

Pembangunan Jalan Tol Serpong Balaraja BSD Harus Koordinasi dengan Pemkab Tangerang

[TANGERANG] Bupati Tangerang, Zaki Iskandar meminta pengembang Bumi Serpong Damai tetap melakukan koordinasi dengan Pemkab Tangerang soal pembangunan jalan tol. BSD sudah membuat rute tersendiri sementara Pemkab Tangerang sudah mempunyai rencana detail tata ruang (RDTR) tersendiri.

“Mungkin kepentingan BSD lebih besar sehingga sudah menentukan rute tersendiri, tapi kita juga sudah punya detail tata ruang sehingga tetap harus koordinasi dengan Pemkab,” tegas Zaki kepada *SP*, Sabtu (30/3).

Dikatakan, pembangunan tol Serpong-Balaraja merupa-

kan prakarsa Bupati Tangerang Ismet Iskandar. Tujuannya untuk pengembangan wilayah selatan dan barat Tangerang serta mengurangi beban jalan tol Tangerang – Merak.

Pemkab Tangerang sangat berkepentingan dengan pembangunan jalan tol ini sehingga detail tata ruang juga disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah.

BSD bersama konsorsiumnya sudah membuat rute tersendiri yang menurut Pemkab tidak sesuai dengan RDTR Kabupaten Tangerang. Oleh karenanya perlu dikoordinasikan lagi.

“Kita bisa saja mengubah rute yang sudah disi-

apkan BSD karena memang sudah hak Pemkab karena kepentingan masyarakat Tangerang juga lebih besar sehingga BSD tidak bisa buat rute sendiri tanpa koordinasi,” tegas Zaki.

Direktur Mitra Kerta Raharja, *holding company* Kabupaten Tangerang, Dwi Ronono menambahkan, penggarapan proyek tol sepanjang 30 kilometer April ini rencananya memasuki tahapan pembebasan lahan. Pemkab Tangerang sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak antara lain Kodam V Jaya yang memiliki lahan yang cukup luas di Kecamatan Curug dan Tigaraksa.

“BSD selama ini tidak

pernah berkoordinasi dan tidak mau diajak bicara dalam pengerjaan jalan tol ini, sehingga kita juga mengalami hambatan dalam koordinasi dengan pihak-pihak lain pemilik tanah yang akan dilalui sesuai RDTR,” ujar Direktur Mitra Kerta Raharja, Kabupaten Tangerang, Dwi Ronono.

Menurutnya, siapa pun pemenang lelang harus tetap melibatkan Pemkab Tangerang. Kalau tidak Pemkab bisa mengkaji ulang rute yang akan dibangun, Penegasan ini sudah disampaikan secara resmi ke Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum. “BPJT sudah mengetahui hal itu,”katanya. [132]